

## **EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

***Brayen Kapoh<sup>1</sup>, Rudy J. Pusung<sup>2</sup>***

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia  
Email : brayenkapoh07@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana penulis memperoleh data secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan yang meliputi dokumen-dokumen dan pelaksanaan penggunaan uang persediaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006, namun dalam pelaporan pengeluaran kas uang persediaan masih menggunakan aplikasi simda online belum menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD sesuai dengan aturan Permendagri nomor 70 tahun 2019.

**Kata Kunci : Sistem dan Prosedur, Pengeluaran Kas, Uang Persediaan**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the systems and procedures for disbursing cash supplies carried out by the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The data used in this study is primary data where the authors obtained data directly from the original source and not through intermediaries at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. Data collection methods are observation, interviews and documentation. The results of the research on the cash disbursement system and procedures which include documents and the implementation of the use of stock money are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) number 13 of 2006, but in reporting the cash disbursement of cash supplies, they still use the online simda application and have not used the latest application. namely SIPD in accordance with the regulations of Permendagri number 70 of 2019*

**Keywords : Systems and Procedures, Cash Disbursements, Cash Inventory**

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Era reformasi saat ini di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *good governance*, termasuk di Indonesia. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan harus sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang sudah sangat jelas dituangkan disitu jika tidak dilakukan prosedur tersebut maka pencairan uang persediaan tidak akan dicairkan, laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan pelaksanaannya dan dilaporkan melalui satu sistem yaitu menggunakan aplikasi SIPD agar memudahkan pengontrolan langsung oleh Kemendagri dan meminimalisir kecurangan dalam mengelola keuangan yang ada karena dipantau langsung oleh Kemendagri dan uraian teknis prosedur yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan akan melaporkan penggunaan uang persediaan harus menggunakan aplikasi SIPD yang dimana diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum menggunakan aplikasi SIPD.

### Rumusan Masalah

Bagaimana sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara ?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

### Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan didalam penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal praktik yang dilakukan oleh instansi dalam mengetahui penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.

3. Bagi pembaca, sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan serta bahan kepustakaan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Akuntansi**

(Hery 2017:1) akuntansi merupakan pencatatan, pengurutan dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian moneter menggunakan tujuan eksklusif serta pada hal keuangan, termasuk pemahaman tentang hasilnya.

Kieso dan Weygant, dikutip dalam Putra 2019:46) akuntansi ialah kerangka kerja data yang dipercayakan buat mengenali, mencatat serta memberikan semua peristiwa moneter dari suatu asosiasi kepada individu yang berinvestasi.

Penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa akuntansi dipilah menjadi 3 kegiatan penting, yaitu mengenali, mencatat serta menyampaikan kejadian moneter dari hubungan dengan individu yang diinvestasikan. Organisasi mengenali kejadian moneter seperti yang ditunjukkan oleh uahanya serta menulis kejadian ini guna memberikan catatan pergerakan keuangan. Pencatatan dilakukan secara prosedural, berurutan berdasarkan kegiatan, pada satuan mata uang. Kesimpulannya, dalam menyampaikan bermacam-macam data kepada individu yang tertarik tentang jenis laporan akuntansi atau dikenal sebagai laporan keuangan.

Menurut Kartikahadi, dkk (2016:3) pengertian akuntansi ialah skema data moneter, berfungsi membuat serta mengungkapkan penjelasan klarifikasi untuk berbagai kelompok yang bersangkutan. Akuntansi merupakan keterampilan buat menulis, menyingkat, membedah, dan menyajikan informasi yang mengidentifikasi dengan pertukaran moneter dalam usaha atau organisasi. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi dianggap menjadi bahasa usaha lantaran suatu instrumen untuk mengungkapkan data moneter kepada kelompok yang membutuhkannya. Guna mengungkapkan data ini, maka dipakai laporan akuntansi atau yang dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan suatu organisasi umumnya berlaku atas empat bentuk informasi, yaitu Informasi Posisi Keuangan, Informasi Laba Rugi Secara menyeluruh, Informasi Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Elsye dkk (2016:39) akuntansi pemerintah merupakan aspek akuntansi yang diidentikkan melalui organisasi pemerintah serta berbagai instansi bukan fokus pada keuntungan. Akuntansi pemerintah memainkan bagian penting dalam menyediakan laporan keuangan guna tanggung jawab publik. Apabila akuntansi pemerintahan belum selesai, jelas pendapatan serta pengeluaran negara tiada bakal seperti yang diharapkan dicatat. Akuntansi pemerintah diartikan menjadi program mencatat keuangan negara yang dilaksanakan oleh satuan kerja terkait.

Menurut Surjarweni (2015:18) akuntansi pemerintahan ialah akuntansi yang menyangkut dengan aspek keuangan negara, mulai perkiraan sampai dengan pengerjaan dan penyampaian, termasuk segala dampak yang ditimbulkan.

Menurut Sadeli (2016:6), akuntansi pemerintahan ialah akuntansi yang diidentikkan sebagai aspek keuangan negara dan mempunyai fungsi untuk menyiapkan laporan akuntansi yang berguna tentang aspek kepengurusan (business aspect) administrasi pemerintah, dan membantu pihak

manajemen dalam melaksanakan supervisi atas penggunaan melalui rencana keuangan, sinkron menggunakan ketentuan undang-undang yang ditetapkan.

### **Efektivitas**

Mardiasmo (2017:134) mendefinisikan efektivitas merupakan berukuran berhasil tidaknya perolehan maksud suatu asosiasi guna meraih tujuannya. Jika sebuah asosiasi mencapai maksudnya maka asosiasi ini sudah berjalan secara efektif. Indikator efektivitas mendeskripsikan jangkauan dampak (outcome) berdasarkan (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin menonjol kontribusi output yang diberikan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, jadi semakin efektif proses kerja suatu unit asosiasi.

### **Sistem**

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem merupakan satu kesatuan dari dua atau lebih jenis-jenis yang saling berkaitan, yang berinteraksi guna menggapai sebuah tujuan. Sekian banyak sistem terdiri atas sub sistem yang lebih kecil yang menopang sistem yang lebih besar.

### **Tujuan Sistem**

Tujuan sistem ialah tujuan yang mau dicapai oleh suatu sistem. Karakteristik atau standar bisa juga dipakai menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi sebuah keberhasilan suatu sistem dan sebagai alasan dilakukannya suatu pengendalian (Susanto, 2013:23)

### **Kas**

Pontoh (2013:242) menyatakan kas adalah akun paling likuid pada laporan keuangan yang paling membutuhkan supervisi yang ketat pada perolehannya juga penggunaannya. Baik pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur, kas sering banyak terlibat dengan sebagian besar transaksi. PSAK No 2, setara kas ialah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat mampu dijadikan kas pada jumlah eksklusif tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang besar.

Menurut Wiegant, Kimmel, Kieso. (2015) kas adalah aktiva yang sangat liquid, merupakan mekanisme standar perdagangan dan merupakan alasan untuk memperkirakan dan mewakili setiap barangnya. Biasanya, Kas didelegasikan menjadi aktiva lancar. Kas antara lain koin, uang kertas serta aset yang dapat diakses pada bank. Mekanisme yang bisa diperdebatkan, misalnya pos wesel (money order), cek terkonfirmasi (certified check), cek kasir (cashier check), cek individu, beserta wesel bank (bank draft) jua dipercaya menjadi kas.

Kas didefinisikan menjadi uang tunai dan saldo simpanan pada bank yang setiap waktu bisa dipakai guna membayar aktivitas pemerintahan. Mengikuti penjelasan itu, jenis kas bisa diperbedakan atas uang tunai dan saldo simpanan bank (Ratmono dan Sholihin 2015:135).

### **Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Mekanisme Uang Persediaan**

- a. Penerbitan surat penyediaan dana  
Selepas kepastian anggaran kas, PPKD tentang manajemen kas membuat SPD. Surat penyediaan dana artinya, dipersiapkan sama kuasa BUD guna ditandatangani sama PPKD. Pengeluaran kas yang membebaskan APBD dikerjakan tergantung pada SPD ataupun arsip lain yang identik lewat SPD.

- b. Penerbitan surat perintah pembayaran  
Mengikuti SPD atau berkas lain yang disamakan lewat SPD seperti yang diharapkan, bendahara pengeluaran menyampaikan SPP pada pemakai anggaran/kuasa pengguna anggaran lewat PPK-SKPD. Pengutaraan berkas SPP-UP bagi pemodal guna memperoleh pengesahan dari klien rencana pengeluaran/perantara klien rencana keuangan melalui PPK-SKPD sehubungan dengan pembaruan kas saham.
- c. Penerbitan surat perintah membayar  
Ketika situasi disinggung, jika dokumen SPP-UP diumumkan selesai dan valid, pemakai anggaran/kuasa pemakai anggaran mengeluarkan SPM. Jika berkas SPP yang disinggung menyatakan kurang atau tidak valid, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak akan memberikan SPM, pembuatan SPM sesuai rencana amat lambat 2 (dua) hari kerja dihitung semenjak pencatatan SPP diperoleh.
- d. Penerbitan surat perintah pencairan dana  
Wewenang BUD mengecek keseluruhan berkas SPM yang disusun sama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran supaya pengeluaran dengan tujuan penggunaan yang diusulkan tidak melewati pagu dan mencapai prasyarat yang diterapkan pada aturan dan undang-undang.  
Ketika keseluruhan berkas SPM-UP buat penerbitan SP2D ialah penegasan tanggungjawab sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Pembuatan SP2D sesuai rencana amat lambat 2 (dua) hari kerja semenjak didapatnya permohonan SPM. Penolakan pemberian SP2D sesuai rencana amat lambat 1 (satu) hari kerja dihitung sejak permohonan SPM diterima.  
Wewenang BUD memberikan SP2D yang sudah diberikan dengan alasan pemberian uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan pada pengguna anggaran anggaran/kuasa pengguna anggaran. Wewenang BUD memberikan SP2D yang diterbitkan buat keperluan pelunasan dengan cara langsung pada pihak ketiga.
- e. Penerbitan surat pertanggungjawaban  
Bendahara pengeluaran dan administratif harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan pada kepala SKPD melalui PPK-SKPD amat lambat sepuluh bulan berikutnya. Berkas yang dipakai ketika mengawasi tanggung jawab pengeluaran meliputi:
- Register penerimaan laporan pertanggung awab pengeluaran,
  - Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
  - Surat penolakan pertanggungjawab pengeluaran (SP),
  - Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP), serta
  - Register ditutupnya kas.

### Penelitian Terdahulu

Ointu (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bolaang mongondow selatan belum efektif dan belum sesuai dengan SE.900/316/BAKD

Kaunang(2017) Prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dimana ada pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban sesuai dengan SE.900/316/BAKD.

Dendeng (2020) Pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi prosedur pengeluaran kas uang persediaan.

### Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu: penulis memperoleh data secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara, data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara yang didapatkan secara langsung dari wawancara antara penulis dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Tempat dan Waktu Penelitian

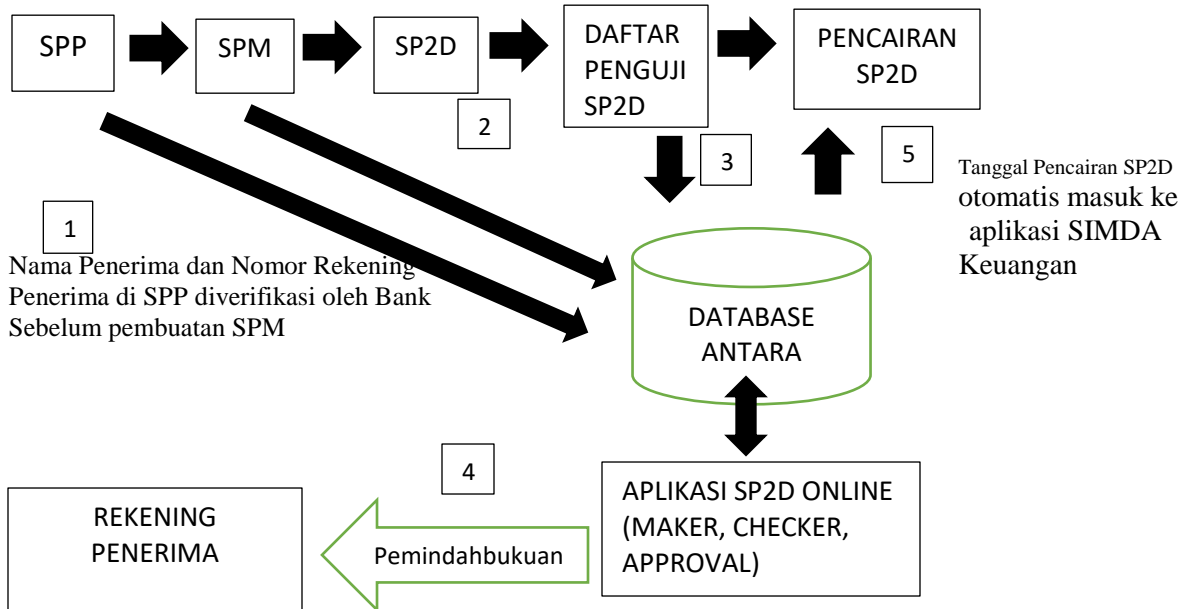
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di JL. Tololiu Supit No. 25 Teling Kota Manado. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan september 2020 sampai dengan Maret 2021.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikansituasi dan fenomena yang terjadi.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan- catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah yang berhubungan dengan instansi.

**Metode Analisis**

**Aplikasi SIMDA KEUANGAN**



**Gambar 1. Flowchart**

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*

Flowchart diatas menggambarkan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan Aplikasi SIMDA KEUANGAN yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Drs. Edwin L. Kindangen, M.Si, Bendahara Pengeluaran Jarmince Sabudu SE dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bryan Christo Wongkar pada tanggal 4 maret 2021 penulis melakukan evaluasi secara mendalam mengenai pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menjalankan prosedur.

**1.1 Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)**

SPD merupakan surat penyediaan dana, yang dibentuk sama BUD pada susunan manajemen kas daerah. SPD dipakai buat mmeberikan dana untuk masing-masing SKPD pada kurun waktu tertentu.

**1.2 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP)**

SPP-UP dipakai guna mengisi uang persediaan masing-masing SKPD. Penyampaian SPP-UP Cuma dilaksanakan setahun satu kali sebelum dimulainya tahun anggaran.

- a. Pemakai anggaran memberikan SPD pada Bendahara serta PPK-SKPD

- b. Mengikuti SPD, Bendahara menciptakan SPP-UP bersama berkas lainnya, termasuk surat pengantar SPP-UP, rangkuman SPP-UP, perincian SPP-UP, salinan SPD, draft surat pernyataan buat ditanda tangani pemakai anggaran/kuasa pemakai anggaran yang mengutarakan hingga uang yg dimohonkan digunakan buat kepentingan melainkan uang persediaan, tambahan lain (tabel rincian planning pemakaian dana hingga menggunakan bentuk belanja.
- c. Bendahara memberikan SPP-UP bersama berkas lain pada PPK-SKPD
- d. PPK-SKPD memeriksa keutuhan berkas SPP-UP serta kesesuaian menggunakan SPD beserta DPA-SKPD
- e. SPP-UP yang menyatakan utuh bakal dibuat rencana SPM sama PPK-SKPD. Diterbitkan SPM amat lambat dua hari kerja semenjak SPP-UP didapat.
- f. Rencana SPM ini lalu dikasih PPK-SKPD pada pemakai anggaran buat diotorisasi
- g. Apabila SPP-UP menyatakan tidak utuh, PPK-SKPD bakal mengeluarkan surat penolakan SPM. Penolakan SPM amat lambat satu hari kerja semenjak SPP-UP didapat
- h. Surat penolakan pembuatan SPM dikasih pada Bendahara supaya Bendahara memenuhi penuntasan SPP-UP. Lalu diberikan pada PPK-SKPD buat diperiksa ulang.

### 1.3 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-UP)

Metode penerbitan SPM ialah jenjang fundamental pada penatausahaan pengeluaran yang adalah tahap berikutnya dari cara pengajuan SPP. Metode ini diawali menggunakan pengesahan untuk SPM yang dianjurkan baik menurut aspek keutuhan berkas juga fakta pengisiannya. SPM bisa dibuat bila pengeluaran yang dimohon jangan melewati pagu anggaran yang disediakan serta dibantu menggunakan keutuhan berkas sinkron aturan perundangan.

### 1.4 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-UP)

Surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah berkas yang dibuat sama wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) sesudah wewenang BUD mengecek keutuhan berkas SPM yang diberikan sama pemakai anggaran/kuasa pemakai anggaran atau SP2D merupakan berkas yang digunakan buat memperoleh dana melalui bank yang dituju sesudah SPM didapat sama BUD. Mekanisme penerbitan SP2D-UP ialah seperti dibawah.

- a. Pemakai anggaran memberikan SPM pada wewenang BUD
- b. Wewenang BUD memeriksa keutuhan SPM yang diberikan
- c. Jika SPM diakui utuh wewenang BUD membuat SP2D amat lambat dua hari kerja semenjak didapatnya penyampaian SPM.
- d. SP2D diberikan pada bank serta pemakai anggaran
- e. Wewenang BUD harus menulis SP2D serta nota debet (berdasarkan Bank) dalam berkas penatausahaan, antara lain dari buku kas penerimaan buku kas pengeluaran
- f. Pemakai anggaran memberikan SP2D pada Bendahara Pengeluaran
- g. Bendahara menulis SP2D kepada berkas penatausahaan, antara lain dari buku pengeluaran, buku pembantu simpanan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, buku rekap pengeluaran rincin objek.
- h. Jika SPM diakui belum utuh, wewenang BUD mengeluarkan surat penolakan pembuatan



SP2D amat lambat satu hari kerja semenjak SPM didapat.

- i. Surat penolakan pembuatan SP2D diberikan pada pemakai anggaran supaya melakukan penuntasan SPM. Lalu diberikan lagi pada wewenang BUD guna diperiksa.

#### 1.5 Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Surat pertanggungjawaban (SPJ) adalah berkas yang mengungkapkan pemakaian menurut dana-dana yang diolah sama Bendahara Pengeluaran. SPJ pun adalah laporan keuangan yang didapatkan menurut Bendahara Pengeluaran. Mekanisme pembuatan SPJ ialah seperti dibawah.

- a. Bendahara Pengeluaran memenuhi penulisan bukti pembelanjaan uang UP
- b. Melalui mekanisme penulisan ini didapatkan berkas yakni Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran, buku pembantu pengeluaran perincian objek buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan/bank, buku pembantu panjar, buku pembantu pajak
- c. Mengikuti 6 berkas tadi menambah berkas SPJ pengeluaran pembantu yang dibentuk sama Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membikin SPJ pengeluaran. Berkas SPJ yakni Buku Kas Umum. Ringkasan pengeluaran perinci objek menyertakan bukti-bukti yang valid, bukti atas setoran PPN/PPH, register ditutupnya kas
- d. Bendahara Pengeluaran memberikan SPJ pengeluaran pada PPK-SKPD. Bendahara Pengeluaran pun wajib memberikan SPJ pengeluaran pada BUD amat lambat tanggal sepuluh bulan selanjutnya.
- e. PPK-SKPD mengkonfirmasi SPJ pengeluaran.
- f. Jika diterima, lalu PPK-SKPD mengungkapkan SPJ pengeluaran pada Kepala SKPD amat lambat tanggal sepuluh bulan selanjutnya.
- g. Kepala SKPD memastikan SPJ pengeluaran
- h. Kepala SKPD memberikan surat validasi SPJ pada Bendahara Pengeluaran.

## 2. Penggunaan Uang Persediaan

Uang persediaan (UP) adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk belanja operasional sehari-hari dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu untuk belanja barang dan jasa, up tidak bisa digunakan untuk belanja modal ataupun belanja honorarium. Penggunaan up menjadi tanggung jawab dari Bendahara Pengeluaran. Besarnya up tergantung pada kebijakan daerah dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara uang persediaan sebesar Rp. 300.000.000. Misalnya jika ada bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan membeli perlengkapan berupa tinta printer, kertas dll maka bidang ini akan melapor kepada pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas kemudian akan didisposisi kepada Bendahara Pengeluaran, jika jenis belanjanya sesuai maka Bendahara Pengeluaran akan memberikan dana untuk keperluan dari bidang tersebut dan bidang yang menggunakan uang persediaan akan melaporkannya kepada Bendahara Pengeluaran.

## Pembahasan

### 1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan sesuai dengan SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

**2. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran**

Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun pada awal tahun anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengisi saldo uang persediaan SPP UP mekanisme ini sudah sesuai dengan SE.900/316/BAKD.

**3. Penerbitan Surat Perintah Membayar**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan SPM-UP sejalan dengan ketentuan dalam SE.900/316/BAKD dimana SPM-UP dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan sedangkan waktu pelaksanaan penerbitan SPM-UP diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP-UP diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP-UP diterima.

**4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana**

SP2D-UP spesifik artinya satu SP2D-UP hanya dibuat untuk satu SPM-UP saja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penerbitan sesuai dengan SE.900/316/BAKD. SP2D-UP dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan sedangkan waktu pelaksanaan penerbitan SP2D-UP, diterbitkan paling lambat 1 hari sejak SPM-UP diterima. SP2D-UP ditransfer ke bendahara pengeluaran.

**5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan ketentuan dalam SE.900/316/BAKD, Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan (UP) kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, namun cara melaporkan dokumen-dokumen yang ada masih menggunakan aplikasi lama simda online belum sesuai dengan aplikasi terbaru yaitu SIPD sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Penggunaan Uang Persediaan Pelaksanaan penggunaan uang persediaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah sesuai dengan aturan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan harus diketahui atau didisposisi oleh pengguna anggaran yakni Kepala Dinas.

##### Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD sehingga masyarakat dipermudah dalam melihat informasi keuangan yang ada dan bisa dipantau langsung oleh Kemendagri.
2. Perbanyak bimbingan teknis (bimtek) mengenai aplikasi SIPD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dendeng, W. F. (2020). Evaluasi prosedur pengeluaran kas dengan menggunakan uang persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Going Concern*, 15(2): 48-54. doi: <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27850.2020>. Diakses pada 4 Oktober 2020.
- Elsye, R., Suwanda, D., Muchidin, U. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hery, 2017. Teori Akuntansi. Grasindo. Jakarta.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara doi: <https://disperindag.sulutprov.go.id/>
- Kartikahadi, H., Sinaga, U. S., Syamsul, M., Siregar, V. S., & Wahyuni, T. E. (2016). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, Edisi Kedua, Buku pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Kaunang, M. (2017). Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 5(2): 1060-1192. doi: <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.16087>. Diakses pada 4 Oktober 2020.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Ointu, M. R. (2016). Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dppkad Kab.Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Emba*, 4(3): 102-221. doi: <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13662>. Diakses pada 4 Oktober 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019>
- Putra, I. M. 2019. Akuntansi dan Perpajakan. Quadrant. Yogyakarta.
- Ratmono, Dwi., & Mahfud Solihin, 2015. "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruial". Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sitem informasi akuntansi, Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Nomor 900-316-BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. <https://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/bytahun/5/2007>

- Sadeli, L. (2016). Dasar-dasar akuntansi. Jakarta.
- Surjarweni, V, M. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya
- Pontoh Winston. 2013. Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat.
- Wiegant., Kimmel., & Kieso. 2015. Financial Accounting. IFSRS Edition, Jakarta.